

Laporan

# LAKIP



**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALU TAHUN 2022**

Alamat : Jl. UNDATA NO. 3 PALU – SULAWESI TENGAH  
Email : [dpkp.palu@gmail.com](mailto:dpkp.palu@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga proses penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 dapat disusun sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yang merupakan bagian pertanggungjawaban Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki 3 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 10 Indikator Kinerja tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan dinas dalam pencapaian kinerja pada satu tahun sebelumnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban yang baik, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja selama tahun 2022 harus dilaporkan secara tertulis dan diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu, Buku Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 ini disusun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memaparkan mengenai pencapaian kinerja selama satu tahun berdasarkan rencana atau target kinerja serta wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kota Palu, serta sebagai bahan evaluasi kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi Pemerintah Kota Palu Kota Palu serta tujuan dan sasaran sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021 - 2026. Kinerja tersebut merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektor pertanian, perikanan dan ketahanan pangan. Pengukuran dan evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui seberapa besar target kinerja yang dapat dicapai, serta hal-hal yang harus diperhatikan dan diperbaiki untuk perbaikan atau peningkatan kinerja pada masa yang akan datang.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, maka mohon masukan dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat bermanfaat untuk kita semua.

Palu, 17 Juli 2023

KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KOTA PALU



*Asharrini Mastura*  
**ASHARRINI MASTURA, SE.,M.Si**  
NIP. 19750221 200212 2 005

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. Latar Belakang .....	1
2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu .....	2
3. Tugas dan Fungsi .....	3
4. Sistematika Penyajian .....	5
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>6</b>
A. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A. Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu .....	10
B. Realisasi Anggaran .....	16
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>21</b>
A. Kesimpulan .....	21
B. Saran .....	21

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penetapan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 .....	6
Tabel 2	Perjanjian Kinerja Tahun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 .....	8
Tabel 3	Perjanjian Kinerja Tahun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 .....	9
Tabel 4	Capaian IKU Tahun 2022 .....	10
Tabel 5	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 .....	12
Table 6	Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022 .....	14
Tabel 7	Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 .....	15
Tabel. 8	Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2021 .....	17
Tabel. 8	Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 .....	20

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Palu yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berasaskan otonomi dan tugas pembantuan pada urusan pangan, urusan pertanian, urusan pangan, urusan kelautan dan perikanan.

Validitas dan reliabilitas data maupun informasi menjadi kunci utama keberhasilan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini. Selain itu, komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan juga sangat menentukan dalam menghasilkan Lakip yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lakip ini diharapkan dapat menjadi pemicu positif dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu secara komprehensif, sehingga dapat mempercepat terwujudnya nawacita, khususnya terkait dengan kedaulatan pangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2022. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan, sehingga dapat meningkatkan kapasitas organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan Meningkatkan kualitas SDM Petugas, Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Pertanian dan Perikanan.
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu .

Secara umum rata-rata capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pengukuran Kinerja adalah berhasil mencapai target dari target renstra yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Capaian Indikator Nilai Evaluasi Sakip sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu BB.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan dengan capaian : kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 93,41 %, produktivitas pertanian perhektar pertahun 82,05 %, persentase penurunan kejadian dan jumlah penyakit hewan menular 166,90 %, jumlah total produksi perikanan 167 %.

3. Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat kota Palu : persentase ketersediaan pangan 70,13 %, ketersediaan energi (kkal/kap/hri) 60 %, ketersediaan protein (gr/kap/hari) 80,66 %, Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 98,64 %.
4. Realisasi keuangan APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2022 baik yang Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) yaitu sebesar Rp. 22.392.331.325 (93,20%), dari 12 program 40 sub kegiatan.
5. Terdapat sisa penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.523.692.070,-. beberapa item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kendala teknis (kejadian covid 19 masih tinggi) akan diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2023.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia karena berfungsi sebagai penyedia pangan, pakan untuk ternak dan bioenergy. Selain itu berperan pula dalam menopang pembangunan nasional, terutama mewujudkan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan. Peran lainnya yaitu mendorong peningkatan daya saing melalui pertumbuhan agroindustri hilir dan memacu ekspor komoditas pertanian untuk meningkatkan devisa Negara. Tidak hanya pada masa sekarang, ke depan sektor pertanian masih diandalkan sebagai sektor yang menyediakan kebutuhan pangan masyarakat. Tugas penyediaan pangan masyarakat tidak ringan, karena diperkirakan penduduk Indonesia pada tahun 2050 mencapai 322 juta jiwa, terbesar kelima di dunia setelah Tiongkok, India, Nigeria dan Amerika (United nations, 2017).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden no. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja OPD dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

**DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA PALU** dibentuk melalui Peraturan Walikota Palu Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah. Mengatur rincian tugas, fungsi dan tata kerja dinas daerah, merupakan upaya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan ekonomis. Berdasarkan Peraturan Walikota Palu Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan dinyatakan bahwa *“Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pertanian, ketahanan pangan, perikanan dan tugas yang diberikan Wali Kota”*.

Pada Tahun 2021 Walikota Palu menetapkan target kinerja yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana
3. Meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mengetahui pencapaian kinerja dan untuk mewujudkan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara bidang pertanian, serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis dan untuk mengetahui akuntabilitas kinerja maka perlu dibuat Laporan Kinerja yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi setiap akhir tahun.

## **1.2. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu**

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu (DPKP) dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota Palu Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku.



### 1.3. Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) di Jajaran Pemerintahan Daerah Kota Palu yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan. OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu perlu melakukan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan pengembangan, penyusunan rencana dan program, pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan perizinan dan pelayanan pada bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Dalam pelaksanaan tugas pokoknya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi :

- a) Melakukan pelaksanaan pembinaan kewenangan dan kebijakan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang diberikan kepala daerah.
- b) Penyusunan rencana pembangunan, pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian dan ketahanan pangan.
- c) Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah
- d) Penyusunan standar pembibitan yang menjadi kewenangan daerah
- e) Penyusunan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah.
- f) Penyusunan program Diklat SDM/aparat pertanian dan ketahanan pangan yang meliputi teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan.
- g) Melakukan pembinaan, pengawasan dan perijinan serta pembinaan usaha pertanian dan ketahanan pangan.
- h) Melakukan pengkajian dan penerapan teknologi pertanian dan ketahanan pangan
- i) Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.
- j) Menyelenggarakan usaha pengelolaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan
- k) Pengelolaan unit pelaksana Teknis Dinas

Dalam penyelenggaraan kewenangan tersebut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan

2. Pelaksanaan kebijakan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
4. Pelaksanaan administrasi bidang pertanian, ketahanan pangan dan perikanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

Adapun struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dipimpin oleh Kepala Dinas yang membawahi :

1. Sekretariat yang terdiri dari :
  - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - Sub Bagian Perencanaan Program
2. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang terdiri dari:
  - Seksi Ketersediaan Pangan
  - Seksi Distribusi Pangan
  - Seksi Kerawanan Pangan
3. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang terdiri dari :
  - Seksi Konsumsi Pangan
  - Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan
  - Seksi Keamanan Pangan
4. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang terdiri dari :
  - Seksi Perbibitan dan Produksi
  - Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terdiri dari :
  - Seksi Tanaman Pangan
  - Seksi Hortikultura
  - Seksi Perkebunan
6. Bidang Perikanan
  - Seksi Perikanan Budidaya
  - Seksi Perikanan Tangkap
  - Seksi Pelayanan Usaha dan Perikanan

7. Bidang Penyuluhan
  - Seksi Kelembagaan
  - Seksi Ketenagaan
  - Seksi Metode dan Info
8. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
9. UPTD Rumah Potong Hewan
10. UPTD Balai Benih Ikan
11. UPTD Lembaga Penerapan Teknologi

#### **1.4. Sistematika Penyajian**

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

**Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

**Bab IV – Penutup**, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAN KINERJA

#### 2.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu serta Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang RPMJD Tahun 2021-2026 dan RPJMD perubahan Kota Palu Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/penjelasan formulasi
1	2	3
1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>- Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>- Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</li> </ul>
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)</li> <li>- Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)</li> <li>- Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</li> <li>- Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten /kota (ton)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PDRB ADH sektor Pertanian dan Perikanan</li> <li>- <math display="block">\frac{\Sigma \text{produksi pertanian pangan pertahun} \times 100\%}{\text{Luas Lahan}}</math></li> <li>- <math display="block">\frac{\Sigma \text{kejadian tahun berjalan (t)} - \Sigma \text{kejadian tahu lalu (t-1)} \times 100\%}{\Sigma \text{kejadian tahu lalu (t-1)}}</math></li> <li>- <math display="block">\Sigma \text{ Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)}</math></li> </ul>

1	2	3
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</li> <li>- Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)</li> <li>- Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)</li> <li>- Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</li> </ul>	$\frac{\text{Ketersediaan Pangan utama} \times 100\%}{\text{Kebutuhan Pangan utama}}$ <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Ketersediaan pada Neraca Bahan Makanan (NBM)</li> <li>- Nilai Ketersediaan pada Neraca Bahan Makanan (NBM)</li> <li>- Nilai Konsumsi pada Neraca Bahan Makanan (NBM)</li> </ul>

Sesuai hasil rekomendasi Penguatan SAKIP OPD di Jogjakarta oleh Kementerian PAN-RB, telah dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Nomor : 027/054/SK/SEK tanggal 1 Maret 2023, tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) setelah perubahan adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi
1	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1 Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	PDRB ADH sektor Pertanian dan Perikanan
2	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 Persentase ketersediaan cadangan pangan (%)</li> <li>3 Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Cadangan Pangan} \times 100\%}{\sum \text{Kebutuhan Pangan}}$ <p>Analisis Pola Konsumsi Pangan</p>

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas akan digunakan untuk mengukur kinerja Esselon II Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sampai berakhirnya periode Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu 2021-2026.

## 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah membuat perjanjian kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja utama tingkat Organisasi Perangkat Daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021 - 2026 Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palu.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021 - 2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Keterangan/penjelasan formulasi
2	3	4
1. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan</li> <li>- Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC</li> <li>BB</li> </ul>
2. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)</li> <li>- Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)</li> <li>- Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular</li> <li>- Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten /kota (ton)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4,10 %</li> <li>5,57</li> <li>-10,00%</li> <li>1.184,72 ton</li> </ul>
3. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>150%</li> </ul>

	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3.100
	Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)	72,90
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81.41

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2023 Setelah Perubahan.

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	1. Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	4,20
2. Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	2. Persentase Ketersediaan cadangan Pangan (%)	150
	3. Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	82,22

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

Evaluasi kinerja tidak hanya menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja, tetapi juga membandingkan pencapaian kinerja tahun 2022 dengan kinerja beberapa tahun sebelumnya, terhadap target akhir jangka menengah, dan menganalisis nilai efisiensi atas penggunaan sumber daya. Selain itu evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan atas pencapaian kinerja yang belum memenuhi harapan, sehingga diperoleh solusi rekomendasi serta rencana perbaikan di tahun berikutnya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja, sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan (*continuous improvement*) dapat terwujud.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2021-2026 memiliki 3 Sasaran Strategis dan 5 Indikator Kinerja. Keberhasilan pencapaian 5 Indikator Kinerja tersebut diukur melalui 2 jenis target yaitu *maximize* target dan *minimize* target. *Maximize* target adalah apabila hasil yang dicapai dibandingkan dengan target nilainya semakin besar, maka semakin baik kinerjanya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan *minimize* target adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target semakin kecil, maka semakin baik kinerjanya.

##### 3.1.1 Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2022 Berdasarkan RPJMD 2021 -2026

Perbandingan target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2022 berdasarkan Renstra 2021 - 2026 di gambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4. Capaian IKU Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase (%)
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	CC	C	85
	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	BB	BB	100



Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	4,10 %	3,95	93,41 %
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	5,57	4,57	82,05 %
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10,00%	-16,69 %	166,90 %
	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten /kota (ton)	1.184,72 ton	1.989,55	167,93 %
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	150 %	105,19 %	70,13 %
	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	3.100	1.860	60 %
	Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)	72,90	58,80	80,66 %
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	81.41	80,30	98,64 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja dari indikator kinerja utama dalam sasaran strategis adalah sebagai berikut :

- Pada sasaran strategis Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel Capaian Indikator Nilai Evaluasi Sakip sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu BB.
- Sasaran Strategis Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan dengan capaian : kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 93,41 %, produktivitas pertanian perhektar pertahun 82,05 %, persentase penurunan kejadian dan jumlah penyakit hewan menular 166,90 %, jumlah total produksi perikanan 167 %,
- Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat kota Palu : persentase ketersediaan pangan 70,13 %, ketersediaan energi (kkal/kap/hri) 60 %, ketersediaan protein (gr/kap/hari) 80,66 %, Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 98,64 %.

Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dan Tahun 2022.

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Realisasi	% Capaian	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	-	-	-	-
	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	BB	100	BB	100 %
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB (%)	3,83	94,10 %	3,95	93,41 %
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (ton/ha)	4,39	80,40 %	4,57	82,05 %
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	+ 2,07 %	- 20,70 %	-16,69 %	166,90 %
	Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten /kota (ton)	1.236,70	110,74 %	1.989,55	167,93 %
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Kota Palu	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	151,09 %	104,70 %	105,19 %	70,13 %
	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.042	65,85 %	1.860	60,00 %
	Ketersediaan protein (Gram/ Kap/ Hari)	60,40	82,85 %	58,80	80,66 %
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	72,90	97,64 %	80,30	98,64 %

Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022 dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian pada tahun 2022 terdapat indikator yang menurun yaitu persentase ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan

ketersediaan protein, tetapi terjadi kenaikan pada skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Palu.

### **3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**

Tercapai dan tidak tercapainya indikator kinerja utama disebabkan antara lain :

- a. Peningkatan nilai evaluasi sakin dari tahun 2021 ke tahun 2022 menunjukkan bahwa OPD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu semakin memperbaiki birokrasi administrasi terutama dalam pelaporan kinerja OPD.
- b. Pada Sasaran Strategis meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan hampir semua indikator mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan adanya saling kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan. Selain itu adanya intervensi penyediaan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan sangat berpengaruh terhadap pencapaian target indikator kinerja.
- c. Pada sasaran strategis meningkatnya ketahanan pangan masyarakat kota Palu terjadi penurunan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan pangan, penurunan ketersediaan pangan masih dalam kondisi aman karena masih berada di atas angka 100 %. Pada Indikator Pola Pangan Harapan (PPH) terjadi peningkatan capaian kinerja yang menunjukkan bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat kota Palu meningkat.
- d. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator kinerja yaitu dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran yang baik serta monitoring evaluasi secara konsisten untuk menjamin pencapaian kinerja perangkat daerah.

### **3.1.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Aspek efisiensi penggunaan sumber daya yang di maksudkan dalam laporan kinerja ini adalah membandingkan antara capaian target kinerja tahun 2022 dengan realisasi anggaran tahun 2022. Sejauh mana realisasi penggunaan anggaran yang digunakan dalam upaya mencapai target kinerja yang di inginkan tahun 2022. Realisasi anggaran tahun 2022 untuk 12 program dan 40 sub kegiatan sebesar Rp. 20.868.639.255,- atau (93,20%) dari target anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan

Pangan Kota Palu sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun 2022 sebesar Rp. 22.392.331.325,- terdapat sisa penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.523.692.070,-. Beberapa item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kendala teknis akan diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2023.

Rincian realisasi penggunaan anggaran tahun 2022 pada tabel berikut :

Tabel 6. Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2022

<b>Uraian</b>	<b>Target (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>(%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	732.798.675	634.848.730	86,63
Program Penanganan Kerawanan Pangan	220.842.860	205.396.880	93,01
Program Pengawasan Keamanan Pangan	17.705.200	14.104.500	79,66
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.325.275.850	2.273.376.369	97,77
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	950.442.750	873.014.430	91,85
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	153.953.150	51.622.850	33,53
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.822.423.400	14.275.512.331	96,31
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.644.707.570	1.249.341.120	75,96
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	701.727.875	493.688.750	70,35
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	387.484.660	385.123.660	99,39
Program Perizinan Usaha Pertanian	24.470.460	24.194.760	98,87
Program Penyuluhan Pertanian	410.498.875	388.414.875	94,62

### 3.1.4 Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 7. Realisasi dan Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022

Uraian	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian
1	2	3	4	5
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Cakupan Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	12 bulan	12 bulan	100%
Penanganan Kerawanan Pangan	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	100%	100%	100%
Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	100%	100%	100%
Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Pengelolaan Perikanan Tangkap	100%	100%	100%
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Cakupan pengelolaan perikanan budidaya	100%	100%	100%
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100%	33,53%	33,53%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100%
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Cakupan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100%	75,96 %	75,96 %
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	100%	70,35%	70,35%
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100%	100%	100%
Perizinan Usaha Pertanian	Cakupan Perizinan Usaha Pertanian	100%	100%	100%
Penyuluhan Pertanian	Cakupan Penyuluhan Pertanian	100%	100%	100%

Terdapat tiga program yang capaian indikatornya di bawah atau sama dengan 75 % yaitu :

1. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 33,53 %, item kegiatan Kajian Kelayakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan Apraisal Pengadaan Tanah Balai Benih Ikan, tidak dapat dilaksanakan karena status tanah dan bukti kepemilikan tanah belum lengkap.
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 75,96 %, item kegiatan Perjalanan Dinas Luar (PDLN) Studi Banding Tanaman Anggur di Korea Selatan tidak bisa dilaksanakan karena pada saat itu kejadian covid 19 di dalam negeri masih tinggi.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 70,35 %, item kegiatan Perjalanan Dinas Luar (PDLN) Studi Banding Tanaman Padi di Thailand tidak bisa dilaksanakan karena pada saat itu kejadian covid 19 di dalam negeri masih tinggi.

## **3.2 Realisasi Anggaran**

### **3.2.1 Belanja Langsung**

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang mana dana tersebut merupakan sebagai salah satu unsur yang sangat penting dalam mencapai sasaran pembangunan. Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu setelah pergeseran perubahan melalui APBD pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 22.392.331.325,- (*Dua Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*) terdiri atas belanja pegawai, barang dan jasa dan modal. Alokasi belanja seluruhnya merupakan belanja rupiah murni. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 mencapai 93,20% atau Rp. 20.868.639.255,- (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembila Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*). Adapun realisasi anggaran 2022 berdasarkan program kegiatan secara rinci terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 8. Realisasi Keuangan Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Keuangan %
1	2	3	4	5
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>22.392.331.325</b>	<b>20.868.639.255</b>	<b>93,20</b>
<b>I</b>	<b><i>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</i></b>			
1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	37.757.000	33.700.000	89.25
2	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	16.896.175	492.000	97.09
3	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	138.145.500	78.944.555	57.15
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	540.000.000	505.800.000	93.67
<b>II</b>	<b><i>Program Penanganan Kerawanan Pangan</i></b>			
5	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	220.842.860	124.227.700	93.01
<b>III</b>	<b><i>Program Pengawasan Keamanan Pangan</i></b>			
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	17.705.200	14.104.500	79.66
<b>IV</b>	<b><i>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</i></b>			
7	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	2.325.275.850	2.273.376.369	97.77
<b>V</b>	<b><i>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</i></b>			
8	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	901.415.900	824.260.280	91.44
9	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota	49.026.850	48.754.150	99.44
<b>VI</b>	<b><i>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</i></b>			
10	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam	153.953.150	51.622.850	33.53

	1 (satu) Daerah kabupaten/Kota			
<b>VII</b>	<b><i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</i></b>			
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.548.000	4.548.000	100
12	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.399.000	3.399.000	100
13	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.024.000	3.024.000	100
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.399.000	3.399.000	100
15	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.291.400	1.291.400	100
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.151.400	42.832.400	97.01
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.585.630	72.531.630	99.93
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.759.500	14.759.500	100
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.120.000	3.120.000	100
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.025.000	14.025.000	100
21	Pengadaan Mebel	14.025.000	14.025.000	100
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	371.035.000	370.832.353	99.95
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	177.000.000	174.371.213	98.51
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.657.329.710	1.602.886.416	96.71
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	590.000.000	562.825.600	95.28
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	90.300.000	78.541.800	86.98
27	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.100.000	7.100.000	100



28	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.900.000	171.900.000	99.67
<b>VIII</b>	<b><i>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</i></b>			
29	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	62.217.980	54.054.080	86.88
30	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	66.040.050	63.126.950	95.59
31	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1.019.593.890	674.955.810	66.20
32	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	496.855.650	457.204.280	92.02
<b>IX</b>	<b><i>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</i></b>			
33	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan /KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	680.539.375	472.826.250	69.48
34	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	21.188.500	20.862.500	98.46
<b>X</b>	<b><i>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</i></b>			
35	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	132.963.000	132.963.000	100
36	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	254.521.660	252.760.660	99.31
<b>XI</b>	<b><i>Program Perizinan Usaha Pertanian</i></b>			
37	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	24.470.460	24.194.760	98.87
<b>XII</b>	<b><i>Program Penyuluhan Pertanian</i></b>			
38	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	158.143.075	138.059.075	87.30
39	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	172.533.150	170.533.150	98.84
40	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	79.822.650	79.822.650	100

### 3.2.2 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun 2022 mendapat anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.583.683.860,- sedangkan realisasinya sebesar Rp. 11.135.627.119,- atau 96,13% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022

Uraian	Pagu 2022	Realisasi	
		(Rp)	(%)
1	2	3	4
<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>11.583.683.860</b>	<b>11.135.627.119</b>	<b>96,13</b>
<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.583.683.860</b>	<b>11.135.627.119</b>	<b>96,13</b>
<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>8.339.438.484</b>	<b>7.956.015.050</b>	<b>95,40</b>
Gaji pokok PNS	6.079.430.652	5.866.409.724	96,50
Tunjangan Keluarga	532.959.780	522.219.556	97,98
Tunjangan Jabatan	387.457.836	349.585.000	90,23
1	2	3	4
Tunjangan Fungsional	546.759.996	458.950.000	83,94
Tunjangan Fungsional Umum	100.434.996	98.620.000	98,19
Tunjangan Beras	328279860	326.903.880	99,58
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	47.290.068	34.775.391	73,54
Pembulatan Gaji	105.516	77.693	73,63
Iuran Jaminan Kesehatan	253.909.896	250.194.467	98,54
Iuran Jaminan Kecelakaan	12.243.420	12.069.758	98,58
Iuran Jaminan Kematian	36.730.608	36.209.581	98,58
Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	13.835.856	0	0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.233.229.367	3.172.912.069	98,13
Insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha RPH	11.016.009	6.700.000	60,82

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Secara umum rata-rata capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan Pengukuran Kinerja adalah berhasil mencapai target dari target renstra yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada sasaran strategis Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel Capaian Indikator Nilai Evaluasi Sakip sesuai dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu BB.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan dengan capaian : kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 93,41 %, produktivitas pertanian perhektar pertahun 82,05 %, persentase penurunan kejadian dan jumlah penyakit hewan menular 166,90 %, jumlah total produksi perikanan 167 %.
3. Sasaran Strategis Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat kota Palu : persentase ketersediaan pangan 70,13 %, ketersediaan energi (kkal/kap/hri) 60 %, ketersediaan protein (gr/kap/hari) 80,66 %, Nilai skor Pola Pangan Harapan (PPH) 98,64 %.
4. Realisasi keuangan APBD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2022 baik yang Belanja Tidak Langsung (BTL) maupun Belanja Langsung (BL) yaitu sebesar Rp. 22.392.331.325 (93,20%), dari 12 program 40 sub kegiatan.
5. Terdapat sisa penggunaan anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 1.523.692.070,-, beberapa item kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena kendala teknis (kejadian covid 19 masih tinggi) akan diajukan kembali pada Tahun Anggaran 2023.

#### **4.2 Saran**

1. Perlu upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik dan tepat waktu serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.

Laporan akuntabilitas kinerja ini bersifat terbuka untuk diperbaiki terus menerus dimasa akan datang. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan kinerja berbagai pihak dilingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Adapun realisasi kinerja dinas secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kewenangan, tugas pokok dan fungsi yang dijalankan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu tahun 2022. Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.